



Analisis Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan

Tutug Sri Jatmiko^{1),a)}, Edi Mulyanto^{2),b)}, Jumino^{3),c)}

¹⁾ Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

²⁾ Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

³⁾ Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

dosen01338@unpam.ac.id^{a)}, dosen01755@unpam.ac.id^{b)}, dosen01803@unpam.ac.id^{c)}

ABSTRACT

The studies which develops in analysis by Location Quotient method on the growth rate of G.R.D.P (Gross Regional Domestic Product) according to the field of businesses in South Tangerang City, a Regional Economic study. Location Quotient is used to compare the Portion of Employment compared to the additional value for the same sectoral at a higher level, namely National. The direction of the analysis is on the angle of the leading sectoral that plays a major roles of the development at the regional economies that is used as the object of research with criteria including high economic growth, large absorption of labor, the existence of inter sectoral al linkages, and the emergence of high added value creation. Such phenomena are economic integration and cooperation extended to small and medium towns and the adjacent rural areas, thus integration and economic development of the entire region. There are 9(nine) by statistical data, there are: (1) agricultures,an livestock,an forestries & fisheries;(2)a minings & excavations;(3) an processing industries;(4) an electricity, gasses, & clean water;(5) an buildings business & civil construction;(6) an trading,an hotels & restaurants busnisses;(7) antransportation & communications tools;(8) an finance, an rental & company services, and (9) an services need to be made a strategy to increase competitiveness with other areas. Developed strategy can based on regional competitive advantages done by strengthening the regional innovation system(“SIDa”), or One Village One Product(O V O P) movement, then an unbalanced development strategy can be implemented by developing agricultural-based industries (agroindustry and agrobusiness).

Keywords: *Regional Economy; Location Quotient Method*

ABSTRAK

Sebuah penelitian yang mengembangkan analisa metode *Location Quotient* terhadap laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan, sebuah kajian tentang kaitannya terhadap Ekonomi Regional. *Location Quotient* digunakan untuk membandingkan bagian tertentu dari lapangan kerja dibandingkan dengan nilai-tambah utk sektor/basis yang serupa pada tingkat yg lebih tinggi, yaitu Nasional. Arah analisa pada sudut sektor unggulan yang berperan besar dalam perkembangan perekonomian wilayah yang dijadikan obyek penelitian dengan kriteria meliputi adanya pertumbuhan ekonomi yg tinggi, adanya penyerapan thd tenaga kerja yg cukup besar, adanya keterhubungan sesama sektor, serta timbulnya penciptaan nilai tambah yang tinggi. Fokus dari penelitian dimaksudkan untuk melakukan analisis thd lajunya per tumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan. Dimana dari 9 (sembilan) sektor yang menurut data statistik, yaitu (1) sektor industri pertanian, sektor industri ternak, sektor pengelolaan hutan dan sektor industriperikanan; (2) sektor-kepertambangan dan sektor galian; (3) basis industri pengolahan; (4) basis kelistrikan, basis gas, dan basis penyediaan air bersih; (5) basis civil dan konstruksi; (6) basis perdagangan, basis perhotelan dan basis restoran; (7) basis pengangkutan dan basis perkomunikasian; (8) basis finance, basis persewaan dan basis jasa perusahaan, serta (9) basis jasa lainnya perlu di buat strategi peningkatan daya saing dengan daerah lain. Strategi yang bisa dikembangkan dapat berbasis pd keberunggulan kompetitif didaerah yg dilaksanakan melalui penguatan model sistem inovasi didaerah (“S.I.D.a”) dan strategi inovasi berbasis komoditas unggulan melalui kebijakan “*One Village One Product*” (OVOP).

Kata Kunci : Ekonomi Regional; Metode *Location Quotient*

PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian sebuah negara bukanlah suatu perkembangan ekonomi yang berdiri sendiri, namun hal tersebut membutuhkan dukungan dari wilayah wilayah yang dimiliki dan juga adanya sinkronisasi dengan kepentingan global, khususnya dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian. Suksesnya pembangunan suatu daerah selain terletak pada kemajuan daerah tersebut, juga terjadi karena adanya pemerataan pendapatan per kapita bruto. Pemerataan yang dimaksud tentunya dalam berbagai hal seperti fisik insfrastruktur, sumber daya manusia, dan kesempatan usaha serta bekerja. Hal tersebut merujuk falsafah Pancasila dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur, lebih sejahtera, lebih adil secara merata. Sehingga membangun basis basis perekonomian yang menyeluruh serta merata adalah agenda penting bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dibawahnya. Kajian ekonomi regional menjadi hal penting dalam

membantu memberikan masukan penentuan arah pembangunan dan pengambil kebijakan pemerataan pembangunan, khususnya di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam perspektif perjalanan positif pertumbuhan produk domestik regional bruto menurut kondisi lapangan usaha yang tersedia.

Gabungan aspek keunggulan pada wilayah tertentu belum tentu akan memberikan kerja pasar yang bagus dan mekanisme ekonomi yang menguntungkan jika aspek keunggulan beserta atribut atributnya pada wilayah tersebut tidak mampu mempengaruhi tindakan-tindakan ekonomi wilayah sekitarnya secara regional.

Wilayah yang kaya terhadap sumber daya alam serta padat penduduk belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus jika tidak ada pergerakan distribusi, sistem pemasaran yang bagus, jarak distribusi dengan pasar, kesediaan tenaga kerja yang berkualitas serta konsumen yang membutuhkan produk unggul tersebut, hal ini senada dengan pernyataan Capello dibukunya *Regional Economics* bahwa munculnya kegiatan ekonomi, bertumbuh serta berkembang di suatu regional tertentu. (Capello, 2015) Ekonomi yang terpusat akan mempengaruhi pemerataan pendapatan sehingga secara total akan mempengaruhi PDRB secara umum pada wilayah. (Jonnadi et al., 2012) Jika hal tersebut tidak diatur secara lebih baik, maka akan berkonsekuensi pada terciptanya kesenjangan ekonomi diantara wilayah pusat dengan wilayah didaerah pinggiran, antar kelompok dengan kelompok dan antar individu dengan individu.

Oleh sebabnya, (*Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Banten (Miliar Rupiah), 2022, 2022*), pemerintah didaerah harus mampu menganalisa dan menentukan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dikuatkan oleh partisipasi masyarakat yang ada serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah melalui kebijakan yang diambil dalam UU. No. 32 Th 2004 mengenai “Pemerintah Daerah”(Indonesia, 2004a) dan UU No. 33 Th 2004 terkait “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah” (Indonesia, 2004b), diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi yang dimiliki serta permasalahan wilayah masing-masing.

Kota Tangerang Selatan sebagai obyek penelitian, dalam beberapa tahun telah terus mendorong berbagai sektor unggulan maupun non unggulan untuk memacu pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Peningkatan PDRB sebagai salah satu faktor ukuran selain jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, serta laju pembangunan infrastruktur dan terserapnya tenaga kerja dan berkurangnya angka pengangguran. Namun kondisi tersebut harus mempertimbangkan pemerataan pada semua wilayah serta tidak menimbulkan ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus terus berpacu dan meningkatkan serta memilih potensi produk unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, sektor peternakan, sektor basis kehutanan dan sektor basis perikanan; (2) sektor basis pertambangan dan sektor basis penggalian; (3) sektor basis industri pengolahan; (4) sektor basis listrik, sektor basis gas, dan sektor basis air bersih; (5) sektor basis bangunan dan sektor basis konstruksi; (6) sektor basis perdagangan, sektor basis hotel dan sektor basis restoran; (7) sektor basis pengangkutan dan sektor basis komunikasi; (8) sektor basis keuangan, sektor basis persewaan dan sektor basis jasa perusahaan, dan (9) sektor basis jasa-jasa agar bisa memetakan mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu digarap lebih serius. Hal tersebut agar mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi seluruh wilayahnya secara seimbang dan serasi antara berbagai sektor yang ada, agar tidak hanya wilayah tertentu yang memiliki pendapatan per kapita tinggi sementara wilayah lainnya terseok seok dalam berupaya mempertahankan pendapatannya.

METODE-PENELITIAN

Melalui proses analisis deskriptif yang dibantu dengan alat analisis *Location Quotion* (LQ), “Analisis Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan”, ingin menghadirkan situasi sosial PDRB Kota Tangerang Selatan dalam batasan waktu tertentu dan indikator tertentu. Dimana data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (B.P.S) Kota Tangerang Selatan untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan rentang waktu pengumpulan data yaitu Desember 2024 sampai dengan Januari 2025. Analisis *Location Quotion* (LQ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat potensi wilayah Kota Tangerang Selatan dan hasilnya dipakai untuk mengetahui sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonominya. Melalui perbandingan porsi pada potensi daerah tertentu untuk sektor tertentu

di suatu wilayah secara lokal dengan potensi porsi didaerah terhadap sektor yg sama diwilayah yg lebih luas (regional) dengan rumusan $LQ_i = \frac{S_i}{S} \cdot \frac{N}{N_i}$, LQ-pada-tahun “i” S_i =Jumlah pekerja sektor didaerah yg dianalis (per kecamatan) N_i =Jumlah pekerja sektor “i” seluruh daerah (Kota Tangerang Selatan) S =Jumlah pekerja semua sektor didaerah yang dianalisa (per kecamatan) N =Jumlah pekerja semua sektor seluruh daerah (Kota Tangerang Selatan). Hasil nilai LQ yang didapat menunjukkan kemampuan dari suatu daerah dalam sektor tertentu, yaitu bila: Nilai $LQ \geq 1$, artinya adalah daerah bersangkutan memiliki atau cenderung ekspor kedaerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis dan perbandingan seberapa besar peranan dari salah satu sektor di Kota Tangerang Selatan terhadap besarnya peranan sektor tersebut kepada tingkat yg lebih tinggi yaitu provinsi bertujuan untuk bisa melakukan identifikasi seberapa potensi internal (sektor basis) dan sektor non basis yg dimiliki. (Morrissey, 2016) Ketika indeks $LQ > 1$, maka sektor tersebut menjadi sektor basis. Untuk $LQ = 1$, berarti sektor tersebut bisa dikatakan Cuma mampu memenuhi permintaan di wilayahnya sendiri, sedangkan apabila $LQ < 1$, sektor tersebut di katakan sebagai sektor non basis atau disebut non unggulan. (Safrizal & Shalih, n.d.) Teknik analisis data yang digunakan secara analisis deskriptif, location quotient (LQ), uji asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinan. Hasil pengolahan data diperoleh bahwa Variabel sektor basis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (Pratama, 2016) dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. Hasilnya bahwa, sektor basis dan non basis diwilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2023 diketahui sektor pertanian, sektor pengelolaan kehutanan, dan sektor budidaya ikan mendapatkan $LQ = 28,19$, sektor tambang dan sektor galian mendapatkan $LQ = 2,68$, sektor Industri Pengolahan mendapatkan $LQ = 3,95$, sektor ke Listrikan dan Gas mendapatkan $LQ = 12,93$, sektor penyediaan Air sektor pengelolaan Sampah dan sektor Limbah daurulang mendapatkan $LQ = 1,98$, sektor ketransportasian dan sektor persewaan gudang mendapatkan $LQ = 2,52$, sektor Jasa Keuangan dan sektor Asuransi mendapatkan $LQ = 2,30$, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mendapatkan $LQ = 1,56$ sehingga masuk dalam kategori sektor unggulan atau basis. Artinya sektor tersebut diatas telah memiliki kemampuan untuk

mendatangkan pendapatan dari proses penjualan barang/jasa ke pasar diluar wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini menimbulkan kenaikan pendapatan terhadap daerah/wilayah tersebut.

Sedangkan, sektor Sipil Konstruksi mendapatkan $LQ=0,69$, sektor Perdagangan skala Besar dan skala Eceran, sektor perbaikan kendaraan mendapatkan $LQ=0,76$; sektor Penyediaan sektor perakomodasian dan sektor restoran mendapatkan $LQ=0,82$; sektor teknologi Informasi dan perkomunikasian mendapatkan $LQ=0,35$, sektor perumahan mendapatkan $LQ=0,46$, sektor Jasa Perusahaan mendapatkan $LQ=0,30$, sektor Jasa lembaga pendidikan mendapatkan $LQ=0,41$, sektor-Jasa penanganan kesehatan dan sektor Kegiatan Sosial mendapatkan $LQ=0,30$, sektor-Jasa lainnya mendapatkan $LQ=0,53$ yang hasilnya dibawah angka 1 masuk dan digolongkan sebagai sektor *non unggulan/non basis*. Artinya sektor yang masuk dalam kategori ini hanya mampu dan bisa memenuhi pangsa pasar sendiri atau pangsa pangsa internal, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor harga, kualitas barang/jasanya yang kurang bisa bersaing, faktor kurangnya promosi dan penetrasi pasar diluar, dan lain sebagainya. Sehingga pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha dan pendapatan masyarakat setempat juga tidak maksimal ataupun kurang yang menyebabkan adanya potensi ketimpangan ekonomi ataupun perbedaan kesejahteraan penduduk dimasing-masing wilayah tersebut.

Tabel 1. Hasil Analisa LQ sektor unggulan atau sektor basis maupun non-basis di-Kota Tangerang-Selatan

No	Klasifikasi Lapangan Usaha	2021	Tahun 2022	2023	Rata- Rata	(+/-)	Basis / non Basis
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,09	28,30	28,19	28,19	+	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	3,26	2,66	2,12	2,68	+	Basis
C	Industri Pengolahan	4,15	3,83	3,87	3,95	+	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,81	12,95	12,02	12,93	+	Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	1,97	1,96	1,98	+	Basis
F	Konstruksi	0,71	0,68	0,68	0,69	-	Non-Basis
G	Perdagangan Besar/ Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	0,75	0,74	0,76	-	Non-Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	1,84	2,72	3,01	2,52	+	Basis
I	Penyediaan Akomodasi- dan Makan Minum	0,84	0,81	0,80	0,82	-	Non-Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	0,35	0,34	0,35	-	Non-Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,38	2,25	2,30	+	Basis
L	Real Estate	0,47	0,46	0,45	0,46	-	Non-Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,30	-	Non-Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	1,53	1,48	1,56	+	Basis
P	Jasa Pendidikan	0,42	0,41	0,41	0,41	-	Non-Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,30	0,30	0,30	-	Non-Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,55	0,53	0,52	0,53	-	Non-Basis

Sumber: diolah dari data BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain (2021-2023)

Pembahasan

Hasil Analisa data memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menggenjot sektor sektor Sipil Konstruksi, sektor Perdagangan skala Besar dan skala Eceran, sektor perbaikan kendaraan; sektor Penyediaan sektor perakomodasian dan sektor restoran; sektor teknologi Informasi dan perkomunikasian; sektor perumahan; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa lembaga pendidikan; sektor Jasa penanganan kesehatan dan sektor Kegiatan Sosial; sektor Jasa lainnya, dengan serius dan dengan inovasi-inovasi baru yang mampu menarik pasar internal maupun eksternal agar lebih berkembang merata di seluruh wilayahnya. Sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan P.D.R.B Kota Tangerang Selatan. Arah kebijakan tersebut digenjot dan dikembangkan lebih serius sembari mempertahankan dan tetap memperhatikan sektor basis Pertanian, sektor basis Kehutanan, dan sektor basis Perikanan; sektor basis Pertambangan dan sektor basis galian; sektor basis Industri ke pengolahan; sektor basis pengadaan kelistrikan dan gas; sektor basis penjualan air bersih, sektor basis pengelolaan sampah, sektor basis perlimbahan dan pen Daur Ulang; sektor basis pertransportasian dan sektor basis

dipergudangan; sektor basis di jasa finance dan sektor basis jasa Asuransi; sektor basis ke Administrasi Pemerintahan, sektor basis di Pertahanan dan sektor basis penjaminan Sosial Wajib sebagai sektor basis atau unggulan agar tetap berjalan normal atau bisa di tingkatkan. Jika sisi pertumbuhan sektor non basis/non unggulan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, mengintegrasikan dan menerapkan jaringan kolaboratif yang inovatif di wilayah yang tersebar merata, maka bisa diharapkan menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk memanfaatkan integrasi ekonomi yang beragam sebaik baiknya untuk mengembangkan wilayah. (Dobrescu & Dobre, 2014)

Misalnya seperti komoditi pada industri pengolahan yang memiliki hasil LQ positif yaitu 3,95 sehingga dikatakan memiliki keunggulan komparatif, namun hasil analisis lebih lanjut yang memperhatikan terhadap kondisi makro dan atau kesesuaian komoditi tersebut menunjukkan bhw komoditi itu akan semakin tidak populer atau terbatas ruang pasarnya dalam jangka panjang, serta makin menyempit pasarnya, maka komoditi tersebut harus lebih serius dikembangkan untuk menemukan keunggulan komparatif yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi pasar mendatang. (Wijaya & Marseto, 2022) Untuk itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan tindak lanjut dalam penelitian yang membahas terkait tren komoditi unggulan di masa mendatang.

Demikian juga jika ada komoditi yang dinyatakan tidak memiliki keunggulan komparatif dan masuk dalam kategori non basis/non unggulan namun diwilayah lain diperlukan, maka pemerintah daerah harus mampu berkoordinasi dengan wilayah sekitar untuk memasarkan produk tersebut atau mempromosikan komoditi tersebut di wilayah lain. (Usya, 2006) Dalam hasil penelitian ini, maka Pemerintah Tangerang Selatan harus mampu memasarkan dan meningkatkan komoditi non basis/non unggulan tersebut agar dapat diterima dipasar wilayah sekitarnya. Sehingga kita tetap perlu melihat apakah kedepanya komoditi ini sebetulnya memilki prospek untuk dikembangkan atau tidak melalui penelitian selanjutnya.

Lebih menggenjot keseriusan dalam pengembangan sektor non basis non unggulan diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan ekonomi daerah yang disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita rakyat tentunya. (Muljarjadi, 2017) Sehingga ketimpangan pendapatan ekonomi wilayah dan rakyat yang berada pada pelaku ekonomi sektor non basis/non unggulan tersebut bisa naik mengejar garis ekonomi dan pendapatan wilayah serta rakyat yang berada pada wilayah sektor

basis/sektor unggulan. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita dan tujuan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Indonesia, 2004b)

Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mengarahkan kebijakan kepada sektor non basis/non unggulan di wilayah yang banyak ditempati pelaku usaha barang/jasa non basis/non unggulan secara teori akan membuat sektor tersebut memiliki daya saing dan kemampuan untuk melakukan perbaikan. (Sutiyo & Maharjan, 2017) Sehingga produk/jasa tersebut akan dilirik oleh konsumen di wilayahnya sendiri maupun konsumen di wilayah lain di luar Kota Tangerang-Selatan. Misalkan usaha Akomodasi dan Makanan Minuman sebagai sektor non basis/non unggulan yang dikembangkan berkualitas, menarik, murah serta mengikuti selera pasar saat ini akan mendatangkan konsumen dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor dan Kabupaten Tangerang untuk memilih akomodasi dan restoran makanan dan minuman yang ada di Tangerang Selatan. Atau sektor non basis/non unggulan pendidikan yang bisa dikembangkan secara maksimal seperti halnya Universitas Pamulang, maka akan mampu bersaing dengan jasa pendidikan dari daerah lain untuk menarik konsumen dari wilayah sekitar seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor dan bahkan daerah lain yang agak jauh seperti Serang, Cilegon, Cikarang, Pandeglang, dll.

KESIMPULAN

Sesuai kutipan dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.15.No.4 th 2015, Pengambilan kebijakan arah pembangunan yang tepat dan kesesuaian sektor unggulan dengan kebijakan program dan keadaan daerah dalam perencanaan dimaksudkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, peningkatan pendapatan daerah otomatis akan meningkatkan P.D.R.B . Dan kebijakan arah Pembangunan yang mengarah pada sektor non basis di wilayah-wilayah yang memiliki pergerakan ekonomi dan usaha non basis juga akan memberikan dampak pemerataan Pembangunan. (Hidayat & Asmara, 2017) Hal ini juga akan berdampak pada kondisi terciptanya kestabilan dalam hal politik, perekonomian, sosial dan kebudayaan serta pertahanan dan keamanan seperti cita-cita Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Pengembangan sektor ekonomi pada wilayah tertentu yang mengutamakan sektor non-basis menjadi pekerjaan yang penuh tantangan, khususnya terkait dengan pemilihan produk/jasa yang tepat. Namun dengan keadaan posisi letak Kota Tangerang Selatan yang cukup strategis dipinggiran wilayah/daerah yang memiliki aktivitas pergerakan manusia

yang padat membuat pemilihan produk/jasa yang non basis apapun akan mendapatkan penerimaan yang cukup signifikan dari pasar. Hal ini terbukti dari PDRB Kota Tangerang Selatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2021 sampai dengan 2023. (Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan Menurut Pengeluaran 2019- 2023, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Capello, R. (2015). *Regional Economics*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315720074>
- Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories Regarding the Role of the Growth Poles in the Economic Integration. *Procedia Economics and Finance*, 8, 262–267.
[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00089-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00089-6)
- Hidayat, A. R. T., & Asmara, A. Y. (2017). Creative industry in supporting economy growth in Indonesia: Perspective of regional innovation system. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 70, 012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/70/1/012031>
- Indonesia, P. P. (2004a). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, P. P. (2004b). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Morrissey, K. (2016). A location quotient approach to producing regional production multipliers for the Irish economy. *Papers in Regional Science*, 95(3), 491–507.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pirs.12143>
- Muljarjadi, B. (2017). *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. UNPAD PRESS.
- Pratama, A. (2016). Pengaruh Sektor Basis dan Non-Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan. *Urnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten (miliar rupiah), 2022*. (2022).

- Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan Menurut Pengeluaran 2019-2023.* (2024).
- Safrizal, A., & Shalih, O. (n.d.). *Aplikasi Metode Location Quotient (Lq) dalam Penentuan Komoditas Palawija Unggulan pada Provinsi Termuda NKRI : Sulawesi Barat.*
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia.* Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Usya, N. (2006). *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang.* Institut Pertanian Bogor.
- Wijaya, I. A., & Marseto, M. (2022). Analisis potensi sektor ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen). *KINERJA*, 19(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10902>